



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melakukan pengendalian intern atas pelaporan keuangan, perlu membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Kuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 409);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atass Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Menerapkan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan sepanjang waktu dan mendokumentasikannya;
 - b. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusunan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan;
 - c. Dokumentasi mencakup rancangan penerapan, dan mekanisme evaluasi pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang tercermin dalam Petunjuk Teknis, Standar Operasional (SOP) & SOP Vertikal/Turunan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, kebijakan administratif, pedoman akuntansi, dan pedoman lainnya;
 - d. Tujuan, Waktu, dan Tahapan Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan sebagai berikut :
 - 1) Tujuan: Menjaga efektivitas penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan, setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

2) Waktu:

a) Tingkat Entitas dan Tingkat Proses/Transaksi = 1 Tahun Sekali.

b) Rentang Waktu = 1 September tahun berkenaan s.d. 15 Januari tahun berikutnya.

3) Tahapan: perencanaan, penilaian tingkat entitas, penilaian tingkat proses/transaksi dan penilaian secara keseluruhan.

KETIGA : Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

a. Membantu manajemen pada setiap level organisasi dengan melakukan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;

b. Menyusun laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;

c. Menyampaikan laporan hasil penilaian kepada:

1) Pimpinan entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang bersangkutan;

2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah masing-masing; dan Tim Penilai di atasnya secara berjenjang.

d. Membantu manajemen pada setiap level organisasi dengan melakukan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;

e. Menyusun laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;

f. Menyampaikan laporan hasil penilaian kepada:

1) Pimpinan entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang bersangkutan;

2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah masing-masing; dan Tim Penilai di atasnya secara berjenjang.

KEEMPAT : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yakni sebagai berikut:

1. Tim Penyusun

a) Melaksanakan pengendalian intern dalam operasional harian

b) Menyiapkan dokumen sumber dan data pendukung untuk penilaian

c) Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dari hasil penilaian pengendalian.

2. Tim Penilai

- a) Menyusun rencana dan kertas kerja penilaian
- b) Menguji rancangan serta efektivitas pelaksanaan pengendalian atas laporan keuangan.
- c) Menyusun dan melaporkan hasil penilaian kepada pimpinan instansi.

KELIMA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 1 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

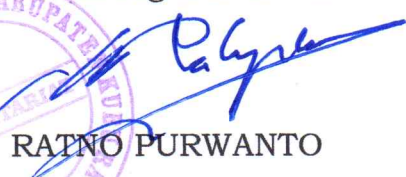
F I T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM


RATNO PURWANTO



LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MAYA ULIARTA, S.I.Kom NIP. 198405102009122003	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Ketua Tim
2.	MUHAMMAD SAID, A.Md NIP. 198002042009021001	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Penanggungjawab
3.	ANITA RAHMAN NADEAK, A.Md NIP. 198712282010122006	Penalaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	DIAN JURIATINA, S.IP NIP. 199312232019032006	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

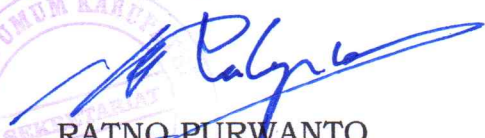
ttd.

F I T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM


RATNO PURWANTO



LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MAYA ULIARTA, S.I.Kom NIP. 198405102009122003	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Ketua Tim
2.	RAJEMI, M.Sos NIP. 198111252009021003	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu & Partisipasi Masyarakat	Penanggung Jawab
3.	SEPTY GUSMANA, S.E. NIP. 198609272009022007	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Anggota
4.	RATNO PURWANTO, S.H. NIP. 197610272010121002	Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	TEGAR TRI WAHYUDI, S.Kom NIP. 200007072025061006	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

F I T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum dan SDM


RATNO PURWANTO

